

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

2. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam prespektif yang sempit dan perspektif yang luas.

Adapun definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya (2006:25) adalah sebagai berikut : *Good Corporate Governance* terkait dengan

pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut : Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran.

Sementara definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah : Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*) untuk menaikkan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

Sedangkan *Forum For Good Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* ialah : Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Dari definisi diatas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG digunakan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadi kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan.

3. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Emirzon, Joni (2006:95) Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparancy*), dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta

perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Moh Wahyudin Zarkasyi 2008:42).

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Dalam penerapan GCG dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menjalankan usahanya dengan sehat, efisien, dan transparan. Dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa maka harus melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif.

4. Governance Structure

Tercapainya pengelolaan perusahaan yang baik maka perlu diatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dari masing-masing struktur di dalam pengelolaan. (Harian Saint:2009) menjelaskan *Governance structure* yang terdiri

atas : Peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perusahaan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif perusahaan dalam kegiatan pengelola perusahaan.

Independensi manajemen perusahaan, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan *financial* dengan anggota komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Perusahaan diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa *governance structure* merupakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan seperti: pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. Sehingga dari berbagai organ ini tidak memiliki hubungan keluarga atau *financial* sehingga setiap organ utama perusahaan dapat melakukan tugasnya secara professional dan independen bebas dari *conflict of interest*.

5. Teori yang Terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

Teori yang terkait dengan GCG menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:28) yaitu:“*Agency theory* (Teori Akuntansi) merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara *principal* dengan menggunakan jasa agen untuk kepentingan *principal*. Secara garis besarnya, *principal* bukan hanya pemilik, tapi juga kreditur, pemegang saham, maupun pemerintah”.

Secara garis besar ada dua bentuk hubungan keagenan menurut (Sofyan Syafri Harahap (2007:554) yaitu : “Hubungan antara agen dengan pemegang saham dan antara agen dengan pemberi pinjaman”. Agar hubungan kontraktual ini berjalan lancar, pemilik perusahaan akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen, dan hubungan ini juga perlu di atur dalam suatu kontrak. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik perusahaan dalam konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dengan dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

6. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan yang menurut Imam Syaputra (2002:9) adalah sebagai berikut :

1. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*
2. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak *principal* dengan agen.

3. Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan dan bertanggungjawab.
4. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi.
5. Dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkan GCG
6. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
7. Terwujudnya citra perusahaan yang baik.
8. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan dapat di percaya agar keputusan yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya.

B. KeefektifanLaba

1. Pengertian Efektivitas

Keefektifan memiliki arti yang sama dengan efektivitas, hal tersebut dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:284) adalah : “Efektivitas memiliki pengertian keefektifan dengan arti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan, dan hal mulai berlakunya”. Syahril (2003:326) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (*actual*) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”.

Menurut Supriyono (2001:330) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya, efektif berarti melaksanakan sesuatu yang benar”. Sedangkan Reider (2002:23) menjelaskan mengenai efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas berkaitan dengan hasil operasi. Apakah suatu perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Jadi, efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas juga selalu berhubungan dengan tujuan organisasi.

2. Pengertian Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2008:113), “Kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur-struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Menurut Harahap (2008:263) laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain : Laba merupakan dasar-dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi

dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Chariri dan Ghozali (2003:214) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa laba itu sendiri memiliki karakteristik sehingga sesuatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dikatakan sebagai laba.

Menurut Chariri (2003:130) jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba atau rugi terdiri dari:

1. Laba kotor.
2. Laba operasional.
3. Laba sebelum pajak.
4. Laba setelah pajak atau laba bersih.

Penjelasan mengenai jenis-jenis laba yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Laba kotor.

Laba kotor adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok pendapatan.

2. Laba operasional

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam rencana perusahaan, kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomian, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal.

3. Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.

4. Laba setelah pajak atau laba bersih

Laba bersih merupakan laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba bersih dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham.

Jadi dari uraian di atas sekarang kita mengetahui bahwa laba itu sendiri terdiri dari empat jenis, yaitu laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak atau laba bersih.

3. Keefektifan Laba

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (2003:284) adalah : “Efektifitas memiliki pengertian keefektifan dengan arti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan, dan hal mulai berlakunya”. Salah satu keberhasilan didalam sebuah perusahaan dilihat dari tercapainya suatu tujuan perusahaan tersebut. Tujuan dalam suatu perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba, maka keefektifan merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan.

Mengukur keefektifan laba Menurut Veihzal Rivai (2005:20) efektivitas dapat digunakan dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas dapat dilihat apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif laba yang ada di perusahaan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:115) pengertian

keefektifan laba adalah sebagai berikut: “Efektivitas ditentukan antara *output* yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek”. Berdasarkan hal tersebut maka untuk tingkat efektivitas dapat dilihat dari semakin besar output yang dikontribusikan pada perusahaan yang sesuai dengan tujuannya.

Tujuan perusahaan pada umumnya untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus dapat mengefektifkan laba pada perusahaan. Alat untuk mengukur suatu laba dikatakan efektif atau tidaknya itu menggunakan anggaran perusahaan, dimana anggaran perusahaan tersebut dibandingkan antara anggaran yang telah di buat dengan realisasi anggaran. Jadi dapat dikatakan keefektifan laba tercapai apabila realisasi laba lebih besar dari laba yang dianggarkan oleh perusahaan (Supadri dan Suherlin, Yuliana, 2009:97).

C. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Kaitannya Dengan Keefektifan Laba

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun upaya mencapai tujuan pada perusahaan (Emirzon, Joni , 2006 : 94).

Menurut Emirzon, Joni (2006:95) Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu: “ 1. *Transparency* (Keterbukaan), 2. *Accountability* (Akuntabilitas), 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), 4. *Independency* (Independensi) dan 5. *Fairness*

(Kewajiban). Kelima prinsip tersebut merupakan suatu alat untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan operasional perusahaan dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan, pimpinan, selaku pengambilan keputusan dalam perusahaan, diharapkan dapat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan dapat di percaya agar keputusan yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya.

Efektifitas sebelumnya sudah dijelaskan bahwa efektifitas menggambarkan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Dalam rangka memudahkan perusahaan mencapai tujuannya, terutama untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, dibutuhkan alat sebagai pengendalian, yaitu salah satunya adalah anggaran, sehingga apa yang telah dilaksanakan sesuai apa yang telah dianggarkan atau yang telah ditetapkan (Supadrji dan Suherlin, Yuliana, 2009 : 97). Suatu laba dikatakan efektif jika realisasi laba sama dengan yang dianggarkan atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran laba yang telah di buat oleh perusahaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan alat bantu perusahaan dalam membuat kemajuan kearah tujuan yang ditetapkan perusahaan. Dimana tujuan utama perusahaan adalah

mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba yang efektif suatu perusahaan harus membandingkan antara realisasi anggaran laba dengan anggaran yang telah dibuat sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tentang Good Corporate Governance yang peneliti temukan dengan judul **“Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Kaitannya Dengan Keefektifan Laba Perusahaan”**.

Penelitian	Judul	Hasil
Yeni (2003)	Analisis penerapan Good Corporate Governance dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pada RS. GL TOBING PTPN II (PERSERO).	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan good corporate governance dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan kerja keras perusahaan yang dijalankan dan berbagai penghargaan yang diterima.
Indrianto (2005)	Analisis Penerapan good corporate governance pada BUMN (Studi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan jaringan Kediri)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance pada PT. PLN (persero) APJ Kediri dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Igbal Bukhori Raharja (2012)	Analisi Penerapan good corporate governance pada PT. BANK X TBK Kanwil.	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada perusahaan.
Aditya Nugraha (2009)	Penerapan good corporate governance pada PADM Surabaya (studi kasus pada perusahaan daerah air minuman kota surabaya).	Hasil yang diperoleh adalah PT. PDAM telah menerapkan prinsip GCG cukup baik walaupun belum sempurna tetapi PDAM kota surabaya berusaha lebih baik dengan menerima dan melaksanakan.
Diana Fajarwati (2011)	Analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal perusahaan umum Badan Urusan Logistik (perum bulog) Jakarta.	Hasil penelitian ini yaitu prinsip - prinsip GCG telah diterapkan dilingkungan perum bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami GCG yang merupakan bagian dari penerapan prinsip GCG pada perusahaan diperlukan suatu kerangka konseptual yaitu GCG merupakan alat bantu perusahaandalam membuat kemajuan ke arah tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif. GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran. Dengan diterapkan kelima prinsip tersebut maka penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dari perusahaan dan dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya. Keefektifan laba pada perusahaan dapat dilihat dengan membandingkan anggaran laba dengan laba realisasi untuk mengukur sejauh mana keefektifan laba yang tercapai di RS. GL TOBING PTPN II (PERSERO). Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.

Sumber: Ahmad Daniri (2009:5)

Gambar 2.1

